

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi e-government pada kinerja Aparatur Sipil Negara dalam penggunaan SIPD kesimpulannya, penerapan e-government melalui penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bappelitbangda Purbalingga memiliki dampak positif yang signifikan dalam menunjang kinerja ASN dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Dengan mengintegrasikan berbagai fungsi pemerintahan dalam satu sistem berbasis teknologi, SIPD memungkinkan ASN untuk bekerja lebih efisien, mengurangi beban administratif, dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta pelaksanaan program pembangunan dapat lebih terjaga, karena semua data dan laporan dapat dipantau secara real-time. Penerapan SIPD juga mendorong peningkatan kompetensi teknologi informasi di kalangan ASN, yang pada gilirannya mendukung kinerja yang lebih responsif dan inovatif. Dampak lainnya adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pelayanan publik, karena mereka dapat dengan mudah mengakses informasi dan memberikan masukan secara langsung. Dengan demikian, e-government melalui SIPD bukan hanya memperbaiki efisiensi internal pemerintahan, tetapi juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjadikan pemerintahan lebih terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada hasil yang lebih baik bagi kemajuan daerah.

Meskipun penerapan e-government melalui penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Bappelitbangda Purbalingga memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk mengoptimalkan kinerjanya. Penggunaan SIPD memang dapat mempercepat proses administrasi dan pengambilan keputusan, serta memungkinkan monitoring dan evaluasi yang lebih baik terhadap program pembangunan. Namun, tantangan terkait dengan kesiapan infrastruktur, pelatihan yang belum merata bagi ASN, serta resistensi terhadap perubahan dalam beberapa bagian organisasi, masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Agar penerapan SIPD dapat lebih maksimal, diperlukan peningkatan infrastruktur teknologi informasi yang lebih handal, serta pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan teknis ASN dalam memanfaatkan sistem ini. Selain itu, perlu adanya evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan terhadap sistem agar dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika yang ada. Dengan perbaikan-perbaikan tersebut, diharapkan e-government melalui SIPD dapat lebih efektif dalam mendukung kinerja ASN, meningkatkan pelayanan publik, dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah di Purbalingga.

Selain itu, guna mengoptimalkan penerapan e-government melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam menunjang kinerja ASN di Bappelitbangda Purbalingga, beberapa langkah perbaikan perlu dilakukan. Pertama, peningkatan infrastruktur teknologi informasi harus menjadi prioritas utama untuk memastikan sistem berjalan dengan lancar dan tidak terganggu oleh masalah teknis, seperti konektivitas yang tidak stabil. Kedua, pelatihan dan pengembangan kapasitas

sumber daya manusia, khususnya ASN, harus diperkuat agar mereka lebih terampil dalam menggunakan sistem yang ada. Pelatihan yang bersifat berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi perlu dilakukan untuk memastikan ASN dapat memanfaatkan sistem dengan maksimal. Ketiga, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi SIPD, dengan memanfaatkan fitur monitoring dan evaluasi yang ada dalam sistem untuk menilai efektivitas setiap program pembangunan. Kemudian, sistem SIPD harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan dan masyarakat yang terus berkembang, serta mampu mengakomodasi feedback dari pengguna dan masyarakat. Terakhir, penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan sistem ini, dengan mempermudah akses informasi dan memberikan ruang untuk pengaduan atau masukan yang dapat membantu meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan langkah-langkah ini, penerapan e-government melalui SIPD di Bappelitbangda Purbalingga diharapkan dapat lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah dan pelayanan publik di masa depan.

#### **4.2. Implikasi**

Implikasi dari penelitian ini terkait implikasi dari penerapan e-government melalui penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk menunjang kinerja ASN di Bappelitbangda Purbalingga sangat luas dan dapat memberikan dampak positif maupun tantangan yang perlu dikelola dengan baik.

Pertama pada aspek Kebijakan secara positif, penerapan SIPD dapat meningkatkan efisiensi kerja ASN dengan mengurangi beban administratif dan mempercepat proses pengambilan keputusan, karena semua data dan informasi terkait

pembangunan daerah dapat diakses secara langsung dalam satu sistem yang terintegrasi. Hal ini juga berdampak pada peningkatan transparansi, di mana seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan dapat dipantau oleh publik dan pihak-pihak terkait lainnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah.

Kedua, aspek Manajerial dan Organisasi e-government melalui SIPD juga menunjang kinerja ASN di Bappelitbangda Purbalingga sangat signifikan, baik dari segi positif maupun tantangan yang perlu dihadapi. Secara positif, penggunaan SIPD dapat meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan dengan mempermudah akses dan pengelolaan data yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah juga memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah berpartisipasi dalam proses pembangunan, memberikan masukan, dan mengajukan pengaduan, sehingga memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga.

Ketiga, aspek Pengukuran dan Evaluasi terdapat implikasi tantangan, seperti kebutuhan akan peningkatan kapasitas ASN dalam mengoperasikan teknologi informasi yang terus berkembang, serta kebutuhan untuk memperkuat infrastruktur teknologi agar sistem dapat berjalan secara optimal. Keterbatasan infrastruktur dan koneksi internet yang belum merata di beberapa area juga bisa menjadi hambatan dalam mengakses sistem dengan lancar. Selain itu, ada kemungkinan resistensi terhadap perubahan dari sebagian ASN yang sudah terbiasa dengan cara kerja manual.

Keempat, aspek Pengelolaan Tata Kelola Pemerintahan proses adaptasi terhadap sistem baru ini juga dapat menimbulkan resistensi dari sebagian ASN yang belum

terbiasa dengan perubahan tersebut. Oleh karena itu, implementasi SIPD memerlukan perhatian ekstra dalam hal pelatihan, pembaruan sistem secara berkala, serta manajemen perubahan yang baik untuk memastikan bahwa semua elemen di Bappelitbangda dapat bekerja secara sinergis dalam memanfaatkan teknologi demi tercapainya tujuan pembangunan daerah yang lebih baik.

Dengan demikian, penting bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk terus mendorong inovasi dalam e-government di era digitalisasi seperti penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada perencanaan, serta memastikan bahwa setiap elemen pemerintahan atau stakeholder terlibat dalam upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan menyelesaikan tugas dan wewenangnya sebagai Aparatur Sipil Negara yang ada di Pemerintah Kabupaten Purbalingga